



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Mei 2018/Periodik - 2017)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH KONSTITUSI  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT JENDERAL  
**SUB UNIT KERJA** : BIRO KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **MULYONO**
2. Jabatan : **KEPALA BIRO KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN**
3. NHK : **111990**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.477.000.000

1. Tanah Seluas 175 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 875.000.000
2. Tanah Seluas 140 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 112.000.000
3. Tanah Seluas 110 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 88.000.000
4. Tanah Seluas 410 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 410.000.000
5. Tanah Seluas 114 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 342.000.000
6. Tanah Seluas 100 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
7. Tanah Seluas 100 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 431.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL SENDIRI  
Rp. 1.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AGYA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI  
Rp. 75.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI  
Rp. 5.000.000
4. MOBIL, TOYOTA FORTUNER JEEP Tahun 2015, HASIL SENDIRI  
Rp. 350.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 867.385.909**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 3.775.385.909



III. HUTANG

Rp. 144.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.631.385.909

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **TIDAK LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **29 Januari 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.